



**PIDATO
PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP RANPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025
SENIN, 20 JULI 2026**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

**YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. FORKOPIMDA PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. PIMPINAN DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN
OPD, DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, PIMPINAN BUMD
YTH. SDR. TENAGA AHLI DPRD, REKAN-REKAN WARTAWAN DAN
UNDANGAN SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA.**

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, siang hari ini kita dapat kembali melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam acara :

1. Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, dan
2. Penyampaian Nota Pengantar terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD, undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada siang hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada hari ini, Senin tanggal 20 Juli 2026, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

.....(Ketukan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan Tata Tertib, Rapat Paripurna untuk penetapan Ranperda dan APBD, dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota DPRD.

.....
Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota
.....

Memperhatikan kehadiran Anggota DPRD telah memenuhi kourum, maka Rapat Paripurna telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami Hormati;

Sesuai dengan agenda yang ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 11 Juni 2026, pada hari ini akan dilaksanakan 2 (dua) agenda rapat paripurna, yaitu Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 dan Penyampaian Nota Pengantar terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026.

Berhubung belum tuntasnya penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026 oleh karena belum keluarnya hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yang menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026, maka Gubernur Sumatera Barat melalui surat Nomor

: 900.1.1/911/APKD/BPKAD/2026 tanggal 17 Juli 2026, meminta untuk penjadwalan kembali rapat paripurna penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026.

Dengan demikian, pada rapat paripurna hari ini, kita hanya melaksanakan 1 (satu) agenda saja, yaitu Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Sesuai dengan amanat Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa dalam rangka akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, pada rapat paripurna tanggal 18 Juni 2026 yang lalu, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, untuk selanjutnya di bahas dan disepakati bersama dengan DPRD.

Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasannya mulai dari pembahasan pendahuluan oleh Komisi bersama OPD dan dilanjutkan dengan pembahasan dan finalisasi oleh Badan Anggaran Bersama TAPD.

Berhubung Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan sarana evaluasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD, maka dalam pembahasannya tidak hanya menyangkut pada realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah atau SILPA, akan tetapi juga mencakup aspek efektivitas, efisien, akuntabilitas serta capaian target kinerja program dan kegiatan yang dicapai.

Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran Bersama TAPD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, secara umum dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2025, telah cukup maksimal. Dalam kondisi APBD yang berkontraksi cukup dalam pasca

dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 serta terjadinya banjir hidrometeorologi di akhir tahun 2025 yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial, realisasi pendapatan daerah masih bisa diwujudkan sebesar 99,03 % dan realisasi belanja juga dapat direalisasikan sebesar 94,59 %. Demikian juga dari aspek akuntabilitas dan transparansinya, BPK memberikan opini WTP terhadap LKPD Tahun 2025.

2. Capaian realisasi pendapatan dan belanja dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025 tersebut, tentu bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah ditengah-tengah kondisi yang tidak menguntungkan. Untuk itu, kami dari DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan APBD Tahun 2025.
3. APBD Tahun 2025 yang semula direncanakan defisit sebesar Rp. 117.734.953.995,43,- dengan adanya kebijakan efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja daerah serta penggunaan anggaran yang tepat sasaran, dapat berubah menjadi surplus sebesar

Rp. 166.945.059.808,-. Dengan adanya surplus tersebut membuka ruang fiskal yang cukup lebar pada Perubahan APBD Tahun 2026 nanti.

4. Meskipun kinerja dalam pengelolaan APBD Tahun 2025 telah cukup baik, namun masih ada beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah, baik terhadap kinerja dalam pengelolaan pendapatan maupun belanja daerah, agar APBD semakin berkualitas, semakin efektif dan efisien dan memberikan kontribusi yang maksimal untuk Pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

Untuk lebih lengkapnya hasil pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran Bersama TAPD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2025, termuat dalam laporan Badan Anggaran yang akan disampaikan nanti oleh Badan Anggaran pada rapat paripurna ini.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Sebelum hasil pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 dilanjutkan pada tahap pembicaraan Tingkat kedua dalam Rapat Paripurna ini, diakhir pembahasan pembicaraan tingkat pertama, Fraksi-Fraksi telah menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya.

Dari pendapat akhir Fraksi-Fraksi tersebut, semua Fraksi dapat menyetujui hasil pembahasan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna dan disamping itu, Fraksi-Fraksi juga memberikan catatan dan masukan yang perlu menjadi perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah, agar kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih baik.

Sesuai dengan agenda pada tahap pembicaraan tingkat kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pada

rapat paripurna ini, Badan Anggaran akan menyampaikan Laporan hasil pembahasannya terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan dan Penetapan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Sesuai dengan urutan kegiatan tersebut, kita minta kepada Sdr. Sekretaris DPRD selaku Sekretaris Badan Anggaran untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025.

.....
Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Ranperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025
.....

Terima kasih kami sampaikan Sekretaris DPRD yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025.

Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota Dewan, apakah dapat menyetujui hasil

pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang telah memberikan persetujuannya terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD.

Sesuai dengan maksud Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, telah disiapkan konsep Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan konsep Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Untuk itu, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD membacakan konsep Keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan DPRD tersebut.

.....
.....
Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Kesepakatan
Bersama tentang Ranperda PPA Tahun 2025
.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD dan Kesepakatan Bersama tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Selanjutnya kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dan Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, untuk ditanda tangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya terhadap konsep Keputusan DPRD untuk ditetapkan

menjadi Keputusan DPRD dan Penandatanganan Persetujuan Bersama terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025.

Pada kesempatan ini, dapat kami informasikan bahwa Keputusan DPRD dimaksud diberikan Nomor : 9/SB/2026 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkannya Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, maka acara kita lanjutkan dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Gubernur dan DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD, kami persilahkan menuju tempat yang telah ditentukan.

.....
Penandatanganan Kesepakatan Bersama Ranperda
Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025
.....

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Dengan telah ditanda tangannya Nota Persetujuan Bersama oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD, maka sesuai dengan agenda pada rapat paripurna ini, acara dilanjutkan dengan Penyampaian Pendapat Akhir/ Sambutan Gubernur Sumatera Barat.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan.

.....
Penyampaian Pendapat Akhir/Sambutan Gubernur
.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan Sambutan/Pendapat Akhirnya terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dalam Pasal 195 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ditegaskan, bahwa Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD yang telah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD, disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak disepakati kepada Menteri Dalam Negeri, untuk dievaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memenuhi batasan waktu penyampiannya kepada Menteri Dalam Negeri, agar Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, dapat segera dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah disepakatinya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, maka berakhir pulalah rapat paripurna pada hari ini. Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, kami menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin dan undangan semua, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini, terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbilamin, Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 pada hari ini, secara resmi kami tutup.

*Terima kasih
Billahitaufiq walhidayah
Wassalam'mualikum wr.wb*